

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Keluarga Berencana

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Jumlah Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa adalah banyaknya adalah seorang atau beberapa orang Kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelolah Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW.
- Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub-PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang Kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelolah Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.
- Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
- Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

**RUJUKAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana Dan Angka Kreditnya

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

**UKURAN**

Orang

**UNIT**

Kepala Dinas Sosial

**KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah Sub-PPKBD diwilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Semakin banyak Sub-PPKBD di sebuah wilayah, maka semakin besar tingkat keberhasilan program KB di wilayah tersebut.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**DOKUMEN**

SIPD

